

ABSTRAK

Peran Pendidikan Tinggi (PT) terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) telah diakui secara global. Pengembangan sejumlah Sustainability Assessment Tools (SATs) telah dilakukan, namun mayoritas sebelum tahun 2015 sehingga dimensi-dimensi yang diukur dalam SATs belum mengakomodasi upaya pencapaian TPB. Tujuan umum penelitian ini adalah mengembangkan model indeks pengungkapan keberlanjutan yang komprehensif dan relevan agar dapat digunakan pemangku kepentingan untuk mengukur akuntabilitas keberlanjutan di PT di Indonesia. Tujuan khusus penelitian ini ada dua hal yaitu (1) mengembangkan model indeks pengungkapan keberlanjutan yang komprehensif dengan kriteria meliputi indikator keberlanjutan (ekonomi, sosial dan lingkungan) serta indikator akademik (pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat); dan (2) mengembangkan model indeks pengungkapan keberlanjutan yang relevan dengan kriteria sesuai dengan karakteristik PT; mencerminkan praktek keberlanjutan di PT serta sesuai dengan harapan pelaku dan masyarakat sehingga kontrak sosial sebagai proksi legitimasi terpenuhi. Populasi target penelitian ini adalah PT Indonesia baik Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Pendidikan Tinggi Swasta (PTS) yang terdaftar di Universitas Indonesia Green Metrics (UIGM) pada tahun 2022 sebanyak 126 PT. Metode sensus digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan semua anggota populasi dalam tahap pertama metode Modified Analytical Hierarchy Process (Modified AHP) sebanyak 126 PT dan mengolah sebanyak 66 responden.

Terdapat beberapa temuan dalam penelitian ini. Temuan pertama yaitu terbentuknya pengembangan model Indeks Pengungkapan Keberlanjutan Pendidikan Tinggi (IPK-PT) berdasarkan pada Indeks Global Reporting Initiatives (GRI), UIGM dan Times Higher Education (THE) dengan mempertimbangkan indikator Sustainable Development Goals (SDGs) dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Diperoleh 115 indikator mencakup indikator keberlanjutan (ekonomi, lingkungan dan sosial) serta indikator akademik (pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat). Temuan kedua adalah peneliti mengembangkan metode pengukuran indeks keberlanjutan yang lebih representatif karena menggunakan triangulasi antara data sekunder dan data primer berupa Modified AHP yang menutup kesenjangan pada metode sebelumnya yaitu Inclusive Examination of Guideline, Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Modified Delphie Method. Temuan ketiga yaitu memberi dukungan terhadap Teori Legitimasi khususnya substantif terkait dengan pengembangan model IPK-PT. Dari tujuh belas sub kriteria yang mendasarkan pada 17 SDGs menunjukkan bahwa sembilan sub kriteria memberikan dukungan atas triangulasi data. PT baik PTS maupun PTN memberikan prioritas yang tidak jauh berbeda untuk indikator indeks pengungkapan keberlanjutan. Temuan terakhir dari penelitian ini adalah mayoritas PT di Indonesia (48 PT) tidak memuaskan dalam melakukan pengungkapan berdasar indeks pengungkapan keberlanjutan yang telah dikembangkan peneliti. Sedangkan terdapat

19 PT dengan kategori unggul; 25 PT dengan kategori baik/di atas rata-rata; 34 PT pada kategori memuaskan/rata-rata. PTS menunjukkan hasil mayoritas berada pada posisi tidak memuaskan; sedangkan PTN menunjukkan hasil mayoritas berada pada posisi baik/di atas rata-rata. Secara rinci PTN-Satker menunjukkan hasil mayoritas berada pada posisi rata-rata/memuaskan dan tidak memuaskan. Sedangkan PTN-BLU menunjukkan hasil mayoritas berada pada posisi tidak memuaskan; PTN-BH menunjukkan hasil mayoritas berada pada posisi baik/di atas rata-rata.

Pengungkapan keberlanjutan terbukti sebagai salah satu strategi legitimasi. IPK-PT dinyatakan komprehensif karena meliputi tiga dimensi keberlanjutan yaitu dimensi lingkungan; dimensi sosial dan dimensi ekonomi sekaligus mempertimbangkan tiga indikator akademik yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Selain itu juga mempertimbangkan standar internasional yaitu SDGs dan regulasi nasional yaitu BAN-PT. Pengembangan IPK-PT dikatakan relevan karena sesuai dengan karakteristik PT dan sesuai dengan harapan pelaku dan masyarakat sehingga kontrak sosial sebagai proksi teori legitimasi terpenuhi.

Implikasi teoritis dari penelitian ini, IPK-PT merupakan bentuk akuntabilitas dan strategi legitimasi yang memberikan motivasi pengungkapan keberlanjutan dalam rangka peningkatan reputasi PT. Hal ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan masyarakat luas (kontrak sosial) melalui upaya meminimalisir kesenjangan legitimasi. Penelitian ini menemukan bukti bahwa PT mengungkapkan lebih banyak informasi substantif dibandingkan tindakan simbolik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kesesuaian antara hasil analisis konten/indeks pengungkapan dengan preferensi pelaku keberlanjutan di PT. Disisi lain, ekspektasi masyarakat terpenuhi sebagai dampak dari PT yang proaktif atas keberlanjutan melalui pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat. Pemenuhan ekspektasi masyarakat tersebut pada aspek kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, air dan sanitasi, energi, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, ketidakadilan, kota dan komunitas berkelanjutan, konsumsi dan produksi, iklim, kehidupan di air, kehidupan di darat, kelembagaan dan kemitraan. Implikasi praktis dari penelitian ini memberikan *mapping*, *benchmarking*, *guidance* dan *best practice* indeks pengungkapan keberlanjutan PT Indonesia yang dapat digunakan oleh para peneliti mendatang, pembuat kebijakan khususnya PT di Indonesia, serta pemangku kepentingan lainnya. Rekomendasi penelitian mendatang sebagai solusi keberlanjutan di PT yaitu diperlukan adanya regulasi yang relevan dengan PT; perubahan mindset dan awareness civitas akademika terkait keberlanjutan; penguatan komitmen pimpinan, tata kelola dan kolaborasi; serta peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran dan sarana prasarana.

Kata Kunci: Indeks Pengungkapan Keberlanjutan (IPK); Pendidikan Tinggi (PT); *Modified Analytical Hierarchi Process (AHP)*